

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan PTNBH. Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang ingin mengkaji secara mendalam terkait bagaimana mekanisme kebijakan PTNBH mempengaruhi otonomi pengelolaan keuangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi berdasarkan evaluasi administratif, evaluasi judicial, serta evaluasi politik.

Pada kerangka evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 aspek utama, yakni evaluasi administratif, evaluasi judicial, evaluasi politik. Evaluasi administratif mengkaji secara mendalam bagaimana otonomi PTNBH mempengaruhi pengelolaan internal perguruan tinggi, termasuk kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan dosen serta tenaga kependidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pengelolaan anggaran secara mandiri, pendirian badan usaha sebagai diversifikasi sumber pendapatan, serta pengelolaan pendanaan secara mandiri, termasuk sumber-sumber pendanaan alternatif selain APBN dan UKT mahasiswa, seperti pengelolaan dana abadi, kemitraan dengan pihak swasta, dan pendapatan dari unit usaha yang dikelola secara efisien dan transparan.

Lalu pada evaluasi judicial menelaah kesesuaian kebijakan PTNBH dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah N0. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selanjutnya pada evaluasi politik menganalisis bagaimana kebijakan PTNBH dipengaruhi oleh berbagai kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta bagaimana hal ini berdampak pada aksesibilitas pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Dalam konteks ini, peneliti membandingkan Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang untuk mengidentifikasi perbedaan dalam strategi pendanaan dan pengelolaan keuangan pada kebijakan PTNBH dan bagaimana kebijakan PTNBH berlangsung pada kedua Universitas tersebut.

Temuan peneliti menunjukkan bahwasannya meskipun transformasi Undip dan Unnes menjadi PTNBH memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan untuk meningkatkan biaya UKT setiap tahunnya sebagai sumber pendanaan utama. Tentu kecenderungan ini berpotensi secara signifikan mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang bertentangan dengan semangat

UUD 1945. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa banyak perguruan tinggi yang berstatus PTNBH masih sangat bergantung pada UKT mahasiswa seperti pada Universitas Diponegoro dan juga Universitas Negeri Semarang, dan juga bisa mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan PTN dari lembaga akademik yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi entitas yang lebih mirip korporasi yang berfokus pada pencarian keuntungan. Adanya pengurangan subsidi dari pemerintah menyebabkan lembaga perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menentukan biaya pendidikan dan mengelola keuangannya secara mandiri. Beban operasional yang harus ditanggung oleh PTNBH pun turut mempengaruhi pengelolaan pendanaan, yang membandingkan beban biaya operasional Universitas Diponegoro yang telah dulu lebih lama menyandang status PTNBH daripada Universitas Negeri Semarang. Selain itu, sumber pendanaan non APBN dan non UKT untuk kedua Universitas, yang menyoroti upaya diversifikasi sumber pendanaan, tetapi juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada UKT. Capaian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2023, menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui keberhasilan dari adanya penetapan sebagai Universitas berstatus PTNBH.

Maka dari itu, pada penelitian ini menegaskan kembali perlunya PTNBH untuk secara proaktif mengembangkan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara otonomi

pengelolaan keuangan, akuntabilitas publik, dan tanggung jawab sosial. PTNBH harus berinovasi dalam menciptakan model pendanaan yang tidak hanya mengandalkan peningkatan biaya kuliah, seperti pengelolaan dana abadi yang profesional, kemitraan strategis dengan sektor swasta yang saling menguntungkan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki secara kreatif. Penting pula untuk memperkuat tata kelola internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendanaan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pendanaan PTNBH, memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwasannya PTNBH tetap berkomitmen pada prinsip pendidikan sebagai barang publik yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia, serta memastikan bahwasannya pendidikan tinggi tetap menjadi sarana mobilitas sosial bagi seluruh warga negara. Dan penelitian ini pun menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan PTNBH untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan PTNBH pada Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, terdapat beberapa saran yang peneliti tuliskan, yaitu untuk pengembangan kebijakan PTNBH ke depannya pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan penetapan UKT. Hal ini cukup penting untuk memastikan bahwasannya otonomi yang diberikan kepada PTNBH tidak mengorbankan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi. Diperlukan juga pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendorong PTNBH mengoptimalkan sumber pendapatan alternatif selain dari UKT mahasiswa, seperti melalui pengelolaan aset yang lebih produktif lagi.

Bagi institusi yang berstatus PTNBH, perlu adanya penguatan strategi diversifikasi pendapatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Universitas dapat mengembangkan model kemitraan strategis dengan industri, mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset untuk komersialisasi, serta membangun sistem pengelolaan dana abadi yang profesional. Penting pula untuk memperkuat sistem informasi keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana. Pengembangan skema beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk menjamin akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif, perlu dikembangkan forum koordinasi reguler antara Kemendiktisaintek,

Universitas berstatus PTNBH, dan pemangku kepentingan yang lain. Tentu forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi praktik baik, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan solusi bersama. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan PTNBH terhadap kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan keberlanjutan finansial institusi, serta mengembangkan model pendanaan alternatif yang dapat menjamin keseimbangan antara otonomi pengelolaan dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Penting juga untuk mempertimbangkan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan PTNBH, termasuk pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif yang mencakup aspek keuangan, akademik, dan dampak sosial. Hal ini tentu akan membantu memastikan bahwa kebijakan PTNBH dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sambil tetap menjaga aksesibilitas dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.